

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	69 / PUU-XXII / 20.24.
Hari	: Kamis
Tanggal	: 18 Juli 2024
Jam	: 13.27 WIB

Depok, 18 Juli 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) terhadap Pasal 22E ayat (1), 28C ayat (1), dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sandy Yudha Pratama Hulu
Tempat, Tanggal Lahir : Tarutung, 26 September 2003
NIK : 1202012609030004
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Ilham Sentosa 2, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411

selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Stefanie Gloria
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 22 November 2004
NIK : 3273226211040001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Batununggal Permai 6 Nomor 28, RT 004 RW 005, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Jawa Barat 40267

selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

untuk selanjutnya dalam hal disebut bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **Para Pemohon.**

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) yang selanjutnya disebut "**UU Pilkada**" terhadap Pasal 22E ayat (1), 28C ayat (1), dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai "**UUD NRI 1945**".

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP” menyatakan bahwa

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

- “(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*
- a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.”*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), yang dirasa oleh Para Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (1), 28D ayat (1), dan 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam Kampanye dilarang:

a. ...;

b. ...;

...

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

...”

Pengujian pasal *a quo* akan dilakukan terhadap Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a) Perorangan warga negara Indonesia;

b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c) Badan hukum publik atau privat; atau

d) Lembaga negara”

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama"

3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

A. KUALIFIKASI

4. Kualifikasi Pemohon I sebagai Perorangan

- Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1202012609030004 [**vide bukti P-1**].
- Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106655923.
- Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**Pemilu**") dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "**Pilkada**") Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon I telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [**vide bukti P-2**].
- Bahwa sembari menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa aktif, Pemohon I juga merupakan Ketua *Constitutional Law Students Association* Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan komunitas Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Dalam komunitas ini, Pemohon I aktif melakukan berbagai diskusi publik, diskusi terbatas, advokasi masyarakat, dan pemantauan isu-isu ketatanegaraan

Indonesia, termasuk isu Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [vide bukti P-3].

- Bahwa selain itu pula, Pemohon I juga merupakan Direktur Eksekutif *Indonesian Law Debating Society* Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bergerak dalam kaderisasi, kepelatihan, serta menjadi delegasi resmi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kompetisi debat hukum dan konstitusi tingkat nasional [vide bukti P-4]. Pemohon I sendiri telah memenangkan berbagai kompetisi debat hukum dan konstitusi mahasiswa tingkat nasional sepanjang menjadi Mahasiswa serta aktif menjadi tim pelatih debat hukum Mahasiswa yang dapat dijabarkan sebagai berikut.
 - Juara I Lomba Debat Hukum Nasional Diponegoro Law Fair 2023 (Lihat: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19716&menu=2>).
 - Juara I Lomba Debat Hukum Nasional Padjadjaran Law Fair XIV 2023 (Lihat: <https://law.ui.ac.id/delegasi-fh-ui-raih-juara-1-kompetisi-debat-hukum-nasional-padjadjaran-law-fair-xiv>).
 - Juara II Lomba Debat Hukum Nasional Airlangga Law Competition 2023 (Lihat: <https://fh.unair.ac.id/airlangga-law-competition-iv-2023-berhasil-terselenggara-bekerjasama-dengan-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia/>).
 - Juara II Lomba Debat Konstitusi Nasional Gebyar Konstitusi VII 2023 (Lihat: <https://law.ui.ac.id/mahasiswa-fhui-raih-juara-1-dan-2-dalam-lomba-debat/>).
 - Juara II dan Best Speaker Lomba Debat Hukum Nasional Red Colony Law Fair III 2022 (Lihat: <https://law.ui.ac.id/mahasiswa-fhui-kembali-raih-juara-2-dan-best-speaker-lomba-debat-di-universitas-warmadewa-bali/>).
 - Juara III Lomba Debat Konstitusi Nasional *Justfest* UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022 (Lihat:

<https://law.ui.ac.id/mahasiswa-fhui-kembali-raih-juara-3-lomba-debat-piala-mahkamah-konstitusi-ri-di-universitas-islam-negeri-sayid-ali-rahmatullah-tulungagung/>).

- Juara III Lomba Debat Konstitusi Nasional UNJA Law Fair III (Lihat: <https://law.ui.ac.id/mahasiswa-fhui-raih-juara-2-3-lomba-debat-di-unja/>).
- Juara I Lomba Debat Hukum Nasional Marvelaw UNNES Competition (Lihat: https://www.instagram.com/p/CWacVFgvtTt/?img_index=1; <https://www.instagram.com/p/CeuHrX0hGF8/?hl=id;> <https://www.instagram.com/p/CeuHp1yBWO6/?hl=id;> <https://www.instagram.com/p/CeuHi5ohamE/?hl=id>).

Dalam organisasi dan kompetisi yang diikuti oleh Pemohon I ini, Pemohon I sering melakukan riset, pendalaman isu, serta debat hukum secara kritis menanggapi berbagai isu baik dari sisi pro maupun kontra.

- Bahwa Pemohon I dengan kehidupan riset dan aktivisme yang dilakukan di masa perkuliahan merasa dirugikan dengan adanya Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang membatasi Pemohon I untuk mendengar dan menguji secara kritis gagasan para calon pemimpin daerah dimana Pemohon I berasal maupun di tempat Pemohon menempuh pendidikan saat ini yang akan dijelaskan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

5. Kualifikasi Pemohon II sebagai Perorangan

- Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3273226211040001 [vide bukti P-5].
- Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswi aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2206039154.

- Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id [vide bukti P-6].
- Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan adanya Pasal 69 huruf i UU Pilkada (untuk selanjutnya disebut Pasal *a quo*). Pemohon melihat potensi tertutupnya informasi mengenai gagasan para calon pemimpin dalam ruang dialog akademis yang akan berpengaruh terhadap pilihan Pemohon sebagai pemilih pemula dalam Pilkada 2024, yang akan dijelaskan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL

6. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
7. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut.

- a. Bahwa adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:
- Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
 - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- b. Bahwa terdapat dua kerugian secara potensial yang dialami Para Pemohon akibat keberlakuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang diujikan pada permohonan *a quo*.
- *Pertama*, bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang lalu, telah banyak ditemukan pelaksanaan diskusi publik, forum akademis, bahkan debat antar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta antar Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD di dalam Perguruan Tinggi. Bahkan, penyelenggaraan kegiatan tersebut mendapat atensi besar dari pihak pengelola kampus serta animo dari para mahasiswa. Beberapa diantaranya dapat dirangkum sebagai berikut.
 - Calon Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan yang menyampaikan kuliah umum di Universitas Bina Bangsa, Serang pada 21 Desember 2023. Dalam kuliah umum tersebut, Anies memberikan ajakan kepada para mahasiswa untuk aktif terlibat dalam dunia politik. Menurutnya, segala persoalan kehidupan sosial memiliki dampak dari kebijakan pemerintah melalui dunia politik. Kuliah umum ini dihadiri oleh banyak civitas

akademika UNIBA Serang yang juga berdialog secara interaktif dengan Capre Anies. (Lihat: <https://www.bantennews.co.id/pidato-anies-baswedan-pukau-mahasiswa-bina-bangsa/>)

- Calon Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang menyampaikan kuliah umum di Universitas San Pedro, Kupang pada 1 Desember 2023. Dalam kuliah umum tersebut, Ganjar memberikan wawasan sekaligus memotivasi mahasiswa terkait bonus demografi, ekonomi hijau dan biru, serta industri kreatif. Kuliah umum ini dihadiri oleh setidaknya 1.500 mahasiswa yang secara aktif menyampaikan keresahan dan pertanyaan kritis kepada Capres Ganjar. (Lihat: <https://www.jawapos.com/nasional/013483498/capres-ganjar-pranowo-diminta-tingkatkan-pendidikan-di-ntt>)
- Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan kuliah umum di Institut Teknologi DEL, Laguboti pada 19 November 2023. Dalam kuliah umum tersebut, Cawapres Gibran diberikan berbagai pertanyaan dan masukan dari para mahasiswa yang hadir. Cawapres Gibran juga menyampaikan visinya bahwa pendidikan yang mengedepankan teknologi bisa menjawab tantangan zaman. (Lihat: <https://news.detik.com/pemilu/d-7044506/kunjungi-institut-del-gibran-harap-sekolah-di-ri-berbasis-teknologi>.)
- Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar yang menghadiri undangan untuk uji publik dan bedah visi misi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas, yang diselenggarakan di Universitas Andalas, Padang pada 4 Desember 2023. Dalam kesempatan yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa tersebut, Cawapres Muhaimin menyampaikan Visi Misi “Indonesia Adil Makmur untuk

Semua” yang diusung oleh Pasangan Anies-Muhaimin dan mendapat respon serta pertanyaan dari para mahasiswa. (Lihat:

<https://klikpositif.com/cak-imin-jelaskan-visi-misi-indonesia-adil-makmur-untuk-semua-di-unand/>)

- Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 3, Mahfud MD yang hadir dalam acara yang bertajuk “Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa” di Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 13 Januari 2024. Dalam acara ini, Cawapres Mahfud menyampaikan gagasan dan visi di hadapan para panelis yang merupakan akademisi serta para civitas akademika yang hadir. Mahfud pun menerima berbagai pertanyaan dari para panelis dan audiens mengenai visi Pasangan Calon Ganjar-Mahfud. (Lihat: <https://news.detik.com/pemilu/d-7139322/sampaikan-visi-di-unhas-mahfud-melanjutkan-itu-harus-mengubah-juga>)
- Tiga Calon Anggota DPRD Kota Surabaya, Rahadian Bino dari Partai NasDem, Sekar Pramesti dari Partai Demokrat, dan Seno Bagaskoro dari PDI Perjuangan yang mengikuti debat kandidat yang bertajuk “Mimbar x Bincang Alumni 2023” dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya, di Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya pada 21 November 2023. Ketiga Calon Legislatif tersebut saling menguji gagasan di hadapan para mahasiswa yang hadir. (Lihat: <https://tekno.tempo.co/read/1799813/cerdasan-politik-generasi-z-bem-fisip-universitas-airlangga-adakan-debat-caleg-muda>)
- Tiga Calon Anggota DPR-RI dan DPD-RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Muhammad Rizal Effendi dari Partai Nasdem, Hetifah Sjaifudian dari Partai Golkar dan Caleg DPD-RI Naspi Arsyad yang mengikuti adu

gagasan di Universitas Mulia Balikpapan pada 19 Januari 2024. Dalam adu gagasan ini, ketiga calon diuji oleh 3 Guru Besar yang memberikan pertanyaan untuk penajaman visi dan misi para Calon Legislatif di bidang ekonomi, ketahanan pangan, sumber daya alam, hubungan pusat dan daerah, serta penegakan hukum. Para mahasiswa yang hadir pun turut memberikan pertanyaan dan antusias menguji gagasan para calon wakil rakyat mereka. (Lihat: <https://pusaranmedia.com/read/26022/tiga-caleg-senayan-adu-gagasan-di-debat-kandidat-universitas-mulia-balikpapan>)

- Bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 69 huruf i UU Pilkada tetap dijalankan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat lagi turut serta dalam menguji ketajaman para Calon Kepala Daerah mengenai visi dan misi serta gagasannya secara mendalam, kritis, dan akademis di dalam perguruan tinggi. Hal ini berpotensi untuk menurunkan kualitas para calon kepala daerah dalam menanggapi isu-isu konkret dan faktual di daerah dalam kerangka akademis. Para Pemohon juga akan kehilangan satu cara yang paling baik dalam menentukan pilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah mendatang. Sebab, dengan menguji secara langsung para Calon Kepala Daerah dalam forum akademis, Para Pemohon akan mampu menentukan pilihan siapa yang dapat menuntaskan masalah di daerah Para Pemohon berasal dan berkuliah saat ini secara baik dan tidak hanya mengedepankan urusan politik semata. Dengan demikian, maka secara nyata hal ini telah merugikan hak Para Pemohon untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

- *Kedua*, bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa yang menggeluti bahkan mengambil mata kuliah Pemilihan Umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam menggeluti isu tersebut, Para Pemohon menyadari bahwa para calon pemimpin bangsa harus diuji kemampuannya oleh seluruh kalangan, termasuk para kalangan akademisi yang ada di perguruan tinggi. Hal tersebut pun telah terjadi dan berdampak positif menurut Para Pemohon dalam Pemilihan Umum 2024 yang lalu. Pelaksanaan kampanye di Perguruan Tinggi sejatinya menjadi jembatan para civitas akademika untuk menguji seberapa layakkah seorang calon pemimpin mampu membawa kebermanfaatannya bagi negara. Dengan keberlakuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada, Para Pemohon dirugikan atas ketidakpastian hukum yang terjadi dalam rezim hukum Pemilihan Kepala Daerah yang masih melarang pelaksanaan kampanye di perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- c. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka kerugian konstitusional karena tidak adanya kesempatan para civitas akademika untuk menguji visi dan misi para Calon Kepala Daerah dalam kerangka akademis di perguruan tinggi serta ketidakpastian hukum dalam pengaturan dalam rezim hukum Pemilihan Kepala Daerah seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menunjukkan konsistensinya dalam melakukan koherensi pengaturan Pemilu dan Pilkada.

III. POKOK PERMOHONAN

A. PENGATURAN IZIN MENYELENGGARAKAN KAMPANYE DI PERGURUAN TINGGI DALAM REZIM PEMILIHAN UMUM HARUS DIJALANKAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Koherensi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

1. Bahwa dalam perkembangan hukum saat ini, penafsiran Mahkamah selalu menekankan mengenai tidak adanya perbedaan antara rezim Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Umum, seperti yang termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan bahkan yang terbaru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XXII/2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU-PRES/XXII/2024. Dalam hal ini, Mahkamah terus berpendirian bahwa tidak boleh lagi ada perbedaan antara rezim pengaturan dan paradigma Pemilihan Umum dengan rezim pengaturan dan paradigma Pemilihan Kepala Daerah.
2. Bahwa secara nyata dalam Bagian [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah berpendirian bahwa rezim Pemilihan Umum dipersamakan dengan rezim Pemilihan Kepala Daerah disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang secara jelas dapat dijabarkan sebagai berikut.

“... 1) Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara de jure dan de facto dilaksanakan oleh lembaga yang sama. Satu-satunya norma dalam UUD 1945 yang menyebutkan penyelenggara pemilihan umum adalah Pasal 22E UUD 1945 ayat (5) yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”; 2) UUD 1945 mengamatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal. 3) Selanjutnya norma UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam beberapa norma undang-undang yang

mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). **Undang-undang yang mengatur lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara normatif tidak membedakan antara penyelenggaraan pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan kepala daerah.** Dalam praktik pun tidak ada perbedaan tersebut. Jika pun terdapat perbedaan, perbedaan demikian hanyalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU RI (atau KPU pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah yang notabene adalah kepanjangan tangan dari KPU RI sehingga keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU RI. Demikian pula Bawaslu daerah yang dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat). Kesamaan demikian didukung pula oleh praktik bahwa subjek yang diperiksa dan diadili oleh DKPP meliputi semua penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah tanpa membeda-bedakan yurisdiksi absolut-nya; 4) Peserta pemilihan umum, baik kontestan (meliputi pasangan calon yang diusung partai politik maupun pasangan calon perseorangan) atau pun pemilih (pemilik hak suara), dapat memahami dan mengikuti/menjalankan konsep pemilihan yang tidak membedakan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah. **Bahkan, menurut Mahkamah dalam implementasi tidak cukup alasan lagi untuk membedakan baik secara konseptual, teoritis, dan sosiologis antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah;** 5) Dari sisi sumber daya dan pembiayaan, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa praktik menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan demikian lebih efisien karena dapat diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang sama, dibandingkan jika Negara harus membentuk dua lembaga penyelenggara yang berbeda;" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bagian 3.17]

3. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, maka Pasal 69 huruf i UU Pilkada secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya mengenai asas adil dalam hal pengaturan Pemilu dan Pilkada yang tidak dapat terjadi dengan keberlakuan pasal *a quo*.
4. Bahwa penggunaan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dalam hal ini tepat digunakan dalam rezim Pemilihan Kepala Daerah. Sebab, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 secara tegas

dinyatakan bahwa Pilkada adalah Pemilu. Sehingga, ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu diberlakukan seluruhnya pula dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal ini pun telah sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa:

“UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bagian 3.17]

5. Bahwa dengan demikian, maka diperlukan suatu konsistensi untuk melakukan koherensi antara rezim pengaturan Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga, tidak akan timbul kerancuan dan perbedaan di antara keduanya seperti yang terjadi saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada membawa ketidakadilan dalam bentuk inkonsistensi pengaturan di UU Pemilu dan UU Pilkada.

Pengaturan Izin Menyelenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi Harus Diperlakukan Pula dalam Pemilihan Kepala Daerah, seperti yang telah Diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan 128/PUU-XXI/2023

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, terdapat perubahan pengaturan mengenai izin menyelenggarakan kampanye di tempat pendidikan. Hal tersebut dapat

ditemukan secara jelas bahwa pasca putusan *a quo*, ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut “UU Pemilu” diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

“Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: ... h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 bagian Amar Putusan].

7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 sejatinya telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXI/2023. Penguatan ini secara jelas menekankan bahwa kampanye Pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan *a quo* yang dalam Bagian [3.14] putusan yang secara lengkap menyatakan:

“Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kampanye di tempat pendidikan akan menimbulkan perpecahan dan polarisasi serta hilangnya marwah dan nilai luhur pendidikan sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terkait dengan kampanye pemilu di tempat pendidikan. Menurut Mahkamah, kampanye pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Selain merupakan sumber potensial dari keberadaan pemilih pemula, perguruan tinggi juga merupakan simbol pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, tempat terkonsentrasinya orang-orang yang terdidik dan terpelajar, serta merupakan pusat energi dan kemampuan untuk melakukan langkah pencegahan yang antisipatif terhadap paham radikal dan intoleran. Oleh karena fungsi perguruan tinggi yang sangat strategis tersebut, menurut Mahkamah, perguruan tinggi melalui civitas akademika memiliki kemampuan besar dalam mengupayakan pendidikan politik serta partisipasi politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kampanye pemilu.

Bahwa kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat membuka kebebasan berbicara, berekspresi, dan mengemukakan pendapat bagi civitas akademika dan merupakan tempat yang tepat dalam menguji visi, misi, program dan/atau citra diri para peserta pemilu, sehingga peserta pemilu kemudian akan mendapatkan ide dan gagasan baru yang merupakan hasil dari diskusi ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian guna perbaikan dan perubahan pembangunan. Perguruan tinggi juga merupakan tempat berkembangnya kebebasan mimbar akademik yang dapat menciptakan dialog antara peserta pemilu untuk membahas sejauh mana program-program yang ditawarkannya dapat dengan mudah diterapkan setelah memenangkan pemilu. Kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat juga membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya untuk menciptakan dan menyebarkan pengetahuan serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bagi mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika dan merupakan pemilih pemula, kampanye pemilu dapat memberikan informasi tentang rekam jejak, visi, misi, dan program kandidat peserta pemilu sehingga dapat menjadi dasar keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik berdasarkan hati nurani pada saat menggunakan hak suara dalam pemilu. Meskipun demikian, kampanye pemilu yang diselenggarakan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pengaturan pembatasan demikian diperlukan agar kampanye pemilu tersebut tidak berubah menjadi kampanye politik yang menimbulkan perpecahan dan polarisasi civitas akademika yang berakhir dengan pelanggaran pemilu.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXI/2023 bagian 3.14]

8. Bahwa Para Pemohon menyadari, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tidak hanya memberikan amar putusan terkait izin menyelenggarakan kampanye di tempat pendidikan, melainkan juga terkait ketentuan penyelenggaraan kampanye di tempat ibadah dan fasilitas pemerintah. Namun, dalam permohonan ini Para Pemohon hanya memberi fokus pada frasa “tempat pendidikan” yang lebih jelasnya “perguruan tinggi atau penyebutan serupa”. Hal ini disebabkan Para Pemohon menyadari bahwa hak konstusionalitas Para Pemohon dalam kedudukan sebagai mahasiswa-lah yang memiliki relevansi dan potensi kerugian terkait perkara *a quo*.

9. Bahwa bila dilihat secara rinci ketentuan mengenai izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dapat dijabarkan sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut.

<p>Ketentuan Izin Menyenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Sebelum Putusan MK)</p>	<p>Ketentuan Izin Menyenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Setelah Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023)</p>	<p>Ketentuan Izin Menyenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Setelah Putusan MK Nomor 128/PUU-XXI/2023)</p>	<p>Ketentuan Izin Menyenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam ketentuan Pasal 69 huruf i UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (yang Diujikan oleh Para Pemohon)</p>	<p>Ketentuan Izin Menyenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi dalam Permohonan Para Pemohon pada Perkara a quo</p>
<p>"Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: ... h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan"</p>	<p>"Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: ... h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu"</p>	<p>Menguatkan Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, akan tetapi dikerucutkan khusus untuk Perguruan Tinggi dalam Pertimbangan Hukum angka [3.14], yang bila dikutip beberapa bagian sebagai berikut.</p> <p>"Menurut Mahkamah, kampanye pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan</p>	<p>"Dalam Kampanye dilarang: ... i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; ..."</p>	<p>"Dalam Kampanye dilarang: ... i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali Perguruan Tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye."</p>

		<p>bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi.”</p> <p>“Meskipun demikian, kampanye pemilu yang diselenggarakan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pengaturan pembatasan demikian diperlukan agar kampanye pemilu tersebut tidak berubah menjadi kampanye politik yang menimbulkan perpecahan dan polarisasi civitas akademika yang berakhir dengan pelanggaran pemilu.”</p>		
--	--	---	--	--

10. Bahwa pada *status quo* hingga saat ini, pengaturan hukum Pemilu dan Pilkada masih dilaksanakan dalam 2 (dua) Undang-Undang yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun Para Pemohon menyadari serta mengamini bahwa saat ini Pilkada tidak boleh lagi dibedakan dengan

Pemilu, namun untuk menjamin kepastian hukum akibat perbedaan Undang-Undang yang mengatur Pemilu dengan Pilkada, maka tetap dibutuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ketentuan dalam UU Pilkada. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengikat pada Undang-Undang yang diujikan, serta tidak bersifat *mutatis mutandis* dengan Undang-Undang lainnya meskipun memiliki singgungan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan 128/PUU-XXI/2023 hanya mengubah ketentuan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, dan tidak serta merta merubah ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada.

11. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan dalam angka 10 (sepuluh) diatas, diketahui pula dalam ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas normanya oleh Para Pemohon mengandung konsekuensi pemidanaan apabila dilanggar ketentuannya. Konsekuensi pemidanaan tersebut sejatinya tertuang dalam ketentuan Pasal 187 ayat (3) UU Pilkada yang secara jelas mengatur bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Dengan demikian, apabila pengujian Pasal *a quo* tidak dilakukan dan hanya mendasarkan diri pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU Pemilu, maka akan terdapat ketidakpastian hukum. Sebab, ketentuan pidana yang melekat dalam Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang diatur dalam Pasal 187 ayat (3) UU Pilkada tidak akan dihapuskan. Justru, hal ini akan berdampak pada diberlakukannya ketentuan Pasal 187 ayat (3) tersebut dan akan menjerat para civitas akademika di dalam kampus yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya.

12. Bahwa dengan uraian dalil permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 69 huruf i UU Pilkada sejatinya bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab, berdasarkan perkembangan hukum dan penafsiran Mahkamah mengenai tidak adanya perbedaan rezim Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah, maka sudah selayaknya ada koherensi dalam pengaturan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dalam rezim pengaturan Pemilihan Umum untuk diberlakukan sama di rezim pengaturan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada membawa ketidakpastian hukum dalam upaya koherensi pengaturan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

B. DIFERENSIASI PERGURUAN TINGGI DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DITINJAU DARI SUDUT PANDANG PSIKOLOGIS MAHASISWA DAN KEMATANGAN PENDIDIKAN POLITIK SEHINGGA TELAH MUMPUNI DALAM MENJEMBATANI POLITIK PRAKTIS DENGAN PARADIGMA AKADEMIS

Kekhususan Konsep dan Peran Perguruan Tinggi dalam Perwujudan Visi Misi Sistem Pendidikan Nasional yang Utuh

13. Bahwa sebagaimana pandangan Majelis Hakim Konstitusi dalam paragraf [3.14] Putusan Nomor 128/PUU-XXI/2023 yang telah dikutip dalam bagian sebelumnya, Perguruan Tinggi merupakan simbol ilmu pengetahuan yang terdiri atas orang-orang terdidik sehingga memiliki kemampuan besar dalam partisipasi politik dalam rangka mewujudkan kebebasan pendapat dan pengujian gagasan yang ditawarkan para calon pemimpin bangsa melalui dialog konstruktif.
14. Bahwa Para Pemohon mengamini tetap perlunya suatu ruang akademis untuk menjadi penyeimbang dan penguji gagasan yang ditawarkan para kandidat dalam kampanye sebagai politik praktis. Hal ini sejalan dengan pandangan Michel Foucault dalam teori postmodernisme yang menyatakan politik-kekuasaan tidak akan dapat sepenuhnya dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Justru melalui pengetahuan lah, kebijakan politik

tersebut dapat diuji (Thomas Flynn, dalam Simposium berjudul Foucault and the Politics of Postmodernity, 1989, hlm. 188; lihat: <https://doi.org/10.2307/2215978>)

15. Bahwa hadirnya ruang akademik dalam proses kampanye menantang adanya instalasi reformulasi kampanye yang bukan sekadar bernarasi provokatif minim gagasan, melainkan mengeksaminasi ide, kebenaran, objektivitas, dan moralitas yang benar-benar sejalan dengan kepentingan publik secara metodologis.
16. Bahwa peran fungsi dan tujuan tersebut hanya menjadi tepat apabila dibebankan kepada Perguruan Tinggi yang secara hierarkis berada pada jenjang terakhir dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya kekhususan-kekhususan yang dimiliki Perguruan Tinggi apabila dikomparasikan dengan jenjang Pendidikan Dasar serta Pendidikan Menengah, yang selanjutnya akan dijabarkan oleh Para Pemohon
17. Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sistem Pendidikan Nasional) membagi jenjang pendidikan formal ke dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (8) UU *a quo* secara tegas menggariskan jenjang pendidikan tersebut merupakan tahapan pendidikan yang penetapannya didasarkan pada tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dikehendaki, dan kemampuan yang hendak dikembangkan. Hal ini turut dinyatakan eksplisit dalam ayat (9) bahwasannya jenis pendidikan didasarkan pada kekhususan tujuan masing-masing satuan pendidikan. Kemudian, apabila kita menilik Pasal 36 ayat (2), disebutkan bahwasannya kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Prinsip diversifikasi ini dimaknai sebagai bentuk penyesuaian program pendidikan pada tiap-tiap satuan pendidikan yang memiliki target pengembangan dan tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian, menjadi terang bagaimana secara yuridis-politis, UU Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu pedoman dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia juga mengakui

(dan bahkan melakukan pemetaan) adanya perbedaan antar tiap satuan jenjang pendidikan.

18. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional memisahkan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dengan satuan lainnya. Pengelolaan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sedangkan pendidikan tinggi didasarkan pada prinsip otonomi. Untuk mengakomodir otonomi perguruan tinggi dalam kerangka pedoman yang khusus, turut dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi)
19. Bahwa dalam poin menimbang huruf (b), Pendidikan Tinggi dinyatakan memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional sebagai cerminan negara dalam memberdayakan bangsa secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing pada era globalisasi (Hal ini selaras dengan bagian Penjelasan UU Sistem Pendidikan Nasional yang menggambarkan Perguruan Tinggi sebagai “garda terdepan” dalam mengembangkan kehidupan bangsa). Lebih lanjut dalam Pasal 5, disebutkan tujuan Pendidikan Tinggi antara lain (i) mengembangkan mahasiswa menjadi manusia yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, (ii) menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi kepentingan nasional, menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, (iii) dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum. Pun secara fungsi, Perguruan Tinggi dituntut untuk antara lain (i) berperan sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, (ii) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, serta (iii) pusat pengembangan peradaban bangsa. Melalui uraian tersebut, jelas terlihat adanya penitikberatan khusus kepada Perguruan Tinggi untuk berkontribusi secara langsung dengan memanfaatkan pengetahuan teoritis ke dalam lapangan praktis kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan pandangan Mohammad Hatta dalam pidato Hari Alumni I Universitas Indonesia yang menyatakan bahwasannya Perguruan Tinggi atau Universitas merupakan tempat mengembangkan ilmu dan aplikasinya ke dalam kehidupan masyarakat.

Perguruan Tinggi merupakan tempat pertemuan antara ilmu dan realitas sebagai sumber menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab dengan mahasiswa sebagai kaum pelajar yang menjadi inisiator penggerak (Kompas Opini, Panggung Politik Perguruan Tinggi, 2023; lihat:

<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/03/panggung-politik-perguruan-tinggi>).

20. Tujuan dan peran fungsi Perguruan Tinggi tersebut menjadi nyata bedanya apabila kita komparasikan dengan tujuan dan peran fungsi jenjang pendidikan lainnya. Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan menggariskan fungsi pendidikan menengah salah satunya adalah meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Lebih lanjut dalam Pasal 77, penjabaran terhadap tujuan pendidikan menengah dititikberatkan pada upaya pertumbuhan pelajar secara individu dalam kerangka teoritis, tanpa secara langsung menuntut adanya kontribusi praktikal terhadap lingkungan sekitar (negara) sebagaimana yang digariskan terhadap Perguruan Tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya berbeda dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi telah memiliki kecakapan (bahkan dituntut) untuk terjun ke dalam ranah praktikal, termasuk politik, dengan berpedoman pada kerangka ilmu yang telah terasah untuk kemajuan kehidupan bernegara bangsa Indonesia.

Kapasitas Perguruan Tinggi dalam Melahirkan Civitas Akademik yang Matang dalam Kontribusi Politik Praktis

21. Bahwa sebagaimana uraian yang telah dipaparkan, Perguruan Tinggi dituntut untuk melahirkan individu-individu kritis yang berorientasi pada pengembangan bangsa. Hal ini sejalan dengan pandangan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Periode 2013-2015, Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H, yang turut menyatakan bahwasannya Perguruan Tinggi merupakan arena penyemaian wadah candradimuka

untuk menghasilkan generasi yang lebih baik. Di tengah kekhawatiran keterlibatan Perguruan Tinggi dalam ranah politik yang akan merusak independensinya, Beliau menyatakan Perguruan Tinggi sebagai ruang untuk berpikir jernih adalah tempat yang tepat bagi para calon pemimpin bangsa diuji sebelum terjun ke dunia politik dan kemasyarakatan. Beliau menegaskan bahwa Perguruan Tinggi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab masalah politik. Justru, Perguruan Tinggi dengan para individu hebat yang bertumbuh di dalamnya, memiliki kewajiban moral untuk turut mengawal, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya demokrasi karena dianggap telah memiliki pemahaman politik yang mumpuni (Mahkamah Konstitusi, artikel berjudul Perguruan Tinggi Penting Mengawal Jalannya Demokrasi, 2014; lihat: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9798>).

22. Bahwa Mohammad Hatta dalam pidato Hari Alumni I Universitas Indonesia menyatakan Perguruan Tinggi seharusnya memiliki kapasitas untuk mencetak pemimpin yang bertanggung jawab, baik mahasiswa yang kemudian akan menjadi pemimpin bangsa itu sendiri, maupun untuk mematangkan para calon pemimpin bangsa nantinya melalui pengujian akademik yang dilakukan oleh civitasnya. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan panggung kampanye politik yang kaya akan substansi berbasis data dan kebenaran ilmiah, mengingat Perguruan Tinggi sudah lama “ditahbiskan” sebagai tempat berkumpulnya agen-agen intelektual dan calon pemimpin yang akan menginisiasi perubahan negara (seperti dosen, mahasiswa, dan civitas lainnya) melalui diseminasi pikiran-pikiran transformatif. Perguruan Tinggi nyata-nyatanya menjadi identik sebagai rumah intelektual dan moralitas yang dibangun melalui dasar kokoh ilmu pengetahuan (Kompas Opini, Panggung Politik Perguruan Tinggi, 2023; lihat: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/03/panggung-politik-perguruan-tinggi>). Hal ini sejalan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan Perguruan Tinggi sebagai tempat yang berhak dan mumpuni memberikan gelar akademik, vokasi, dan profesi. Aktor-aktor yang dimiliki Perguruan Tinggi inilah yang mampu (dan dibutuhkan untuk) menghadirkan panggung pengujian yang paling layak,

yang selama ini diambil alih oleh aktor nonakademik sehingga melahirkan narasi kampanye yang justru bersifat nonkonstruktif.

23. Bahwa menilik argumen tersebut, Perguruan Tinggi telah memiliki kesiapan sebagai sebuah institusi pendidikan untuk terlibat dalam politik praktis negara, yang belum dimiliki pada tahap pendidikan dasar dan menengah. Hal ini bukanlah dilandaskan semangat untuk memolitisasi netralitas Perguruan Tinggi, namun justru menjadi langkah untuk memberdayakan Perguruan Tinggi sebagai institusi demokratis yang netral dalam ilmu pengetahuan, menguji pikiran-pikiran calon pemimpin dalam kampanye politik untuk benar-benar melahirkan sosok dari ruang ilmiah yang kaya akan pemikiran esensial bagi kebutuhan dan pertumbuhan bangsa Indonesia dalam masa jabatannya.

Mahasiswa dan Kesiapan Partisipasi dalam Kampanye Pemilu

24. Bahwa Pasal 1 angka 35 UU Pemilu mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Adapun hal ini dilakukan dengan berbagai medium yang keseluruhannya erat kaitannya dengan pemberian narasi (orasi, atribut, *banner*, dan lainnya)
25. Bahwa dalam praktiknya, kampanye sering dijadikan ajang untuk menyampaikan narasi yang bersifat destruktif, seperti politik identitas, primordialisme, fitnah, dan sensasi miskin gagasan (Puskapol UI, artikel berjudul Politik Identitas dalam Kampanye Pemilu 2019, 2019; lihat: <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu-2019/> dan <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/18/berharap-capres-masuk-kampus>). Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga tidak jarang menimbulkan efek *post-truth* yang diamini publik sebagai suatu kebenaran (Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono, buku berjudul Demokrasi di Era Post-Truth, 2021). Dengan demikian, Para Pemohon mengamini perlu adanya kesiapan dari penerima narasi tersebut agar kampanye tidak malah menimbulkan polarisasi.

26. Bahwa sekalipun mengesampingkan praktik lapangan yang ada, Richard Brunetti menilai narasi, yang terbentuk melalui untaian kata, hanya sekadar koleksi karakter literal yang bersifat deskriptif. Adapun pemberian makna terhadapnya dilakukan sepenuhnya oleh penerima narasi sesuai dengan perkembangan kognitif dan pengalaman mereka masing-masing. Dengan demikian, menjadi logis apabila di tengah perbedaan orang-orang (sebagai penerima narasi) akan muncul pula perbedaan interpretasi makna dari sebuah narasi yang sama. Adapun perbedaan pemaknaan yang lahir dari perbedaan pemahaman disebabkan salah satunya oleh faktor usia. Pollack dan Thompson turut membuktikan bahwasannya faktor usia ini dapat turut ditelaah melalui jenjang pendidikan, di mana dalam hasil penelitiannya bersama dengan Research Foundation of National Council of Teachers of English menemukan perbedaan respons interpretasi antara pelajar pada pendidikan menengah (SMP dan SMA) dengan pelajar pada pendidikan tinggi (kampus) yang mayoritas telah memasuki tahap "*late adolescence*". Klaim ini telah turut dibuktikan oleh Livesley dan Bromley yang mengemukakan perbedaan kategori usia (yang hadir antara pendidikan tinggi dengan jenjang lainnya) memengaruhi perbedaan cara mengorganisasi, menginterpretasi, dan menginternalisasi suatu makna dalam narasi. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan perkembangan diri secara psikologi yang turut didorong oleh lingkungan pendidikan tinggi sebagai lingkungan yang menghadirkan otonomi lebih besar (Richard Beach dan Gerald Brunetti dalam jurnal berjudul *Differences Between High School and University Students in Their Conceptions of Literary Characters*, 1976, hlm. 259-260; lihat: <https://www.jstor.org/stable/40170646>).
27. Bahwa Pakar Pendidikan bidang Hubungan Kemahasiswaan, Dr. Gregory Blimling, dalam bagian bukunya menyatakan bahwasannya pertumbuhan psikologi paling dinamis terjadi pada masa-masa pendidikan tinggi. Masa pendidikan tinggi merupakan masa-masa mahasiswa mengintegrasikan identitas, meningkatkan pemahaman intelektual, dan menginternalisasi nilai dan prinsip-prinsip dalam dirinya sendiri. Seluruh proses ini didukung dengan lingkungan pendidikan

tinggi yang “memaksa” mahasiswa ke dalam suatu komunitas yang lebih kompleks bersamaan dengan lahirnya otonomi yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan Teori “*Chickering’s Seven Vector of College Students Development*” yang menyatakan terdapat 7 (tujuh) pengembangan yang akan terjadi pada mahasiswa selama dalam jenjang pendidikan tinggi, yakni pengembangan kompetensi, pengelolaan emosi, adaptasi menuju kemandirian, pengembangan hubungan interpersonal, penemuan identitas, pengembangan tujuan, dan pengembangan integritas. Selaras dengan pandangan tersebut, William Perry dalam Teori “*Stages of Cognitive Development*” menyatakan terdapat perubahan pemaknaan suatu narasi yang menarik oleh pelajar akibat paparan materi dan lingkungan pendidikan tinggi, yakni Dualisme, Relativisme, dan Komitmen terhadap Relativisme (Gregory Blimling dalam bagian buku *The Resident Assistant 7th Edition Chapter The Growth and Development of College Student*, 2010; lihat: https://he.kendallhunt.com/sites/default/files/uploadedFiles/Kendall_Hunt/Content/Higher_Education/Uploads/Ch08_Blimling_7e.pdf).

28. Bahwa selain perkembangan kognitif yang secara khusus dihadirkan oleh lingkungan pendidikan tinggi, pendidikan tinggi juga dianggap sebagai tempat yang mendorong terjadinya perkembangan moral yang sebelumnya tidak ditemukan dalam jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lawrence Kohlberg dalam Teori “*6 Stages of Moral Development*” menyatakan bahwasannya terdapat perkembangan moral signifikan dalam seorang individu, yang semula penilaian baik dan buruk sepenuhnya didasarkan pada pandangan serta dikte orang lain menjadi berdasarkan pemahaman dan prinsipnya sendiri (telah mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan pemahaman yang telah matang). Teori ini turut didukung dengan Teori “*Moral Development in the College Years*” oleh Carol Gilligan yang menyatakan bahwasannya perubahan tersebut secara signifikan dibentuk oleh paparan ide dan pengaruh yang lebih luas yang ditawarkan oleh pendidikan tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi telah memiliki pengembangan kognitif dan moral yang matang dalam memaknai narasi

dan menyaringnya sesuai dengan prinsip yang dianut (Charles Louis Pride dalam Disertasi berjudul *Group Difference in Psychosocial Development of Undergraduate Students*, 2007, hlm. 20; lihat: https://web.archive.org/web/20190427090508id_/https://ir.library.louisville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2153&context=etd).

29. Bahwa apabila menilik kembali ke Indonesia, keseluruhan pandangan ini sejatinya sejalan dengan uraian Pasal 13 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi yang menyatakan:

*“Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai **insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.**”* [vide Pasal 13 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi]

30. Bahwa pun dalam rekam historis Indonesia, secara khusus Mahasiswa sebagai bagian dari civitas Perguruan Tinggi selalu (dan terus) memegang peran sentral dalam menginisiasi perubahan-perubahan substansial yang berkorelasi pada perbaikan bangsa.
31. Dengan demikian, terbukti bahwasannya berbeda dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Perguruan Tinggi baik dalam kedudukannya sebagai institusi pendidikan, maupun dalam kedudukan para civitas (terkhususnya Mahasiswa) telah memiliki kesiapan kognitif, psikologi, dan moral yang matang sehingga dapat mengemban peran lebih dalam mewujudkan perbaikan ketatanegaraan bangsa, terkhususnya dalam politik tanpa terkontaminasi potensi pengaruh negatif kampanye. Justru, seluruh kesiapan tersebut membuat Perguruan Tinggi dan Mahasiswa sebagai aktor krusial dalam menguji gagasan-gagasan para calon pemimpin dalam kampanye pemilihan umum untuk lahirnya pemimpin bangsa adalah berdasarkan substansi, alih-alih sensasi.

Pentingnya Pemberian Izin Menyenggarakan Kampanye di Perguruan Tinggi pada Tahapan Kampanye, Bukan Sebelum Tahapan Kampanye

32. Bahwa dalam keadaan nyata di Indonesia, pada faktanya para calon kepala daerah, khususnya para calon yang diusung oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik seringkali diumumkan pada saat-saat terakhir sebelum ditutupnya tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kesempatan diantaranya sebagai berikut.

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno yang baru diumumkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 23 September 2016, hari terakhir pendaftaran pasangan calon (Lihat: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160923133008-32-160558/gerindra-dan-pks-usung-anies-baswedan-sandiaga>; <https://news.detik.com/berita/d-3305563/salam-komando-anies-sandiaga-resmi-daftar-ke-kpu>)
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus yang baru diumumkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 10 Januari 2018, hari terakhir pendaftaran pasangan calon (Lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/11242861/pdi-p-dan-ppp-sepakat-usung-djarot-sihar-di-pilkada-sumut>; <https://news.detik.com/berita/d-3807568/diusung-pdip-ppp-djarot-sihar-daftar-pilgub-sumut-siang-nanti>)
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin dan Anton Charliyan yang baru diumumkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 7 Januari 2018, satu hari sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai (Lihat: <https://www.suara.com/news/2018/01/07/112453/tb-hasanuddin-anton-charliyan-sah-diusung-pdip-ke-jabar>)

33. Bahwa berdasarkan keadaan dimaksud, ditemukan fakta bahwa tidak semua pasangan calon kepala daerah dipersiapkan sejak lama oleh para pengusungnya. Terdapat pula calon kepala daerah yang baru diumumkan pada saat-saat terakhir sebelum pendaftaran pasangan calon. Hal ini juga berdampak pada lahirnya kemungkinan terdapat bakal calon kepala daerah yang sudah mempersiapkan diri sejak awal namun batal mendaftar sebagai calon kepala daerah.
34. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon berkesimpulan penyelenggaraan diskusi publik, debat akademis, dan uji gagasan di dalam perguruan tinggi akan semakin berdampak bila dilakukan dalam tahapan kampanye. Sebab, para calon yang diuji juga telah memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai calon kepala daerah yang akan menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Terlebih, Para Pemohon juga berkesimpulan bahwa tidak mungkin Para Pemohon menggantungkan suatu kepastian hukum pada keadaan di luar tahapan resmi Pilkada.
35. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Para Pemohon, ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Sebab, dengan keberlakuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada, para civitas akademika termasuk para mahasiswa tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan menguji para calon kepala daerah yang akan memimpin daerah asal dan tempat berkuliah Para Pemohon saat ini. Padahal hal tersebut merupakan bentuk implementasi mahasiswa dalam memanfaatkan hasil pembelajaran yang didapat melalui pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi. Selain itu, uji gagasan terhadap para calon kepala daerah dalam lingkup akademik juga merupakan sarana informasi yang signifikan dan berharga untuk para mahasiswa menentukan pilihannya. Tertutupnya akses kampanye di dalam Perguruan Tinggi menyebabkan Para Pemohon dan pemilih lainnya memiliki keterbatasan terhadap kampanye-kampanye berbasis uji ilmiah yang jarang ditemukan di tempat-tempat pelaksanaan kampanye di luar wilayah Perguruan Tinggi sehingga berimplikasi pada para pemilih mengalami kesulitan untuk menentukan calon pemimpin terbaik bagi kesejahteraan daerahnya setidaknya 5 (lima) tahun ke depan.

C. PERMOHONAN PROVISI PEMERIKSAAN PRIORITAS DAN DIPUTUS SEBELUM DIMULAINYA TAHAPAN MASA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

36. Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah agar dalam tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, para calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dapat melakukan adu visi dan gagasannya di perguruan tinggi secara akademik.
37. Bahwa pada praktiknya, Mahkamah dalam perkara Nomor 133/PUU-VII/2009, 70-PS/PUU-XX/2022, dan 85/PUU-XX/2022 mengabulkan permohonan provisi dengan alasan untuk memperhatikan adanya kepentingan yang lebih besar yakni menjamin kepastian hukum ataupun adanya kerugian hak konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon sehingga perlu segera untuk memutus suatu keadaan hukum. Dalam hal ini, Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara.
38. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan linimasa Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60). Dalam Peraturan *a quo*, adapun tahapan pelaksanaan kampanye akan dimulai pada tanggal 25 September 2024 dan akan berakhir pada tanggal 23 November 2024 [vide Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024].
39. Bahwa dengan demikian, dibutuhkan kepastian hukum mengenai aturan pelaksanaan kampanye sebelum tanggal 25 September 2024 tersebut. Maka demi terpenuhinya hak konstitusional Para Pemohon dan juga warga negara Indonesia lainnya khususnya para civitas akademika perguruan tinggi yang juga merasa dirugikan karena

- b. Memastikan bahwa pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dapat menguji kemampuan dan kematangan calon pemimpin mereka secara argumentatif dan akademis melalui uji publik di dalam perguruan tinggi.
- c. Memastikan bahwa para calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang akan berkompetisi dalam konstelasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dapat segera mempersiapkan visi, misi, serta gagasan mereka dengan baik untuk dapat diuji oleh kalangan akademisi di perguruan tinggi.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Memberikan prioritas perkara terhadap perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya memutus perkara sebelum tahapan pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sepanjang frasa “tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan

Perguruan Tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.” Sehingga ketentuan dimaksud selengkapnya berbunyi:

“*Dalam kampanye dilarang:*

.....

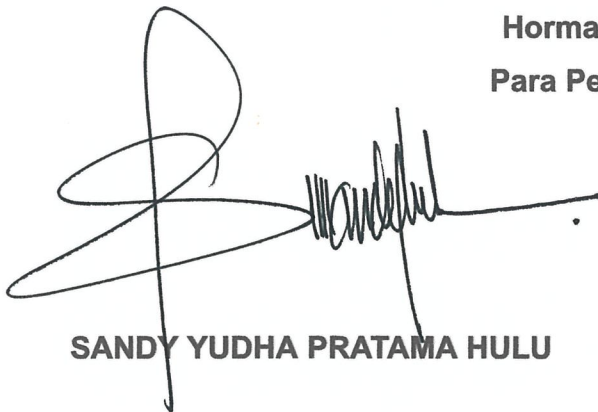
i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali Perguruan Tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.

....”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Para Pemohon,



SANDY YUDHA PRATAMA HULU



STEFANIE GLORIA